



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan program pendidikan formal meliputi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
9. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Magelang.
10. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SPF SD Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Magelang.
11. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Magelang.
12. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari:
 - a. SPF TK Negeri;
 - b. SPF SD Negeri; dan
 - c. SPF SMP Negeri.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPF TK Negeri, yaitu TK Negeri Pembina Magelang;
 - b. SPF SD Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. SPF SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu TK Negeri

Pasal 3

- (1) SPF TK Negeri dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Jabatan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi SPF TK Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional Guru yang melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (3) Bagan struktur organisasi SPF TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua SD Negeri

Pasal 5

- (1) SPF SD Negeri dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Jabatan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi SPF SD Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a, merupakan jabatan fungsional Guru yang melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Guru; dan
 - b. Pustakawan.
- (4) Bagan struktur organisasi SPF SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga SMP Negeri

Pasal 7

- (1) SPF SMP Negeri dipimpin Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Jabatan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi SPF SMP Negeri terdiri atas:
 - b. Kepala;
 - c. Wakil Kepala;

- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional Guru yang melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
 - (3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jabatan fungsional Guru yang melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.
 - (4) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) orang.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Guru; dan
 - b. Pustakawan.
 - (6) Bagan struktur organisasi SPF SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

- (1) SPF TK Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini, yaitu program layanan taman kanak-kanak untuk peserta didik usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) SPF SD Negeri mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).

- (3) SPF SMP Negeri mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 7 (tujuh)
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), SPF TK Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan, penumbuhan, dan pengembangan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
 - b. percontohan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada satuan pendidikan anak usia dini di kecamatan masing-masing;
 - c. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, Komite TK, dan/atau masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan administrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), SPF SD Negeri berfungsi sebagai:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3), SPF SMP Negeri berfungsi sebagai:
 - a. pelaksanaan pendidikan;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, dan/atau masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan unit dan satuan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mempercepat dan mempermudah koordinasi layanan administrasi kependidikan pada satuan pendidikan di Daerah, dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap kecamatan.
- (2) Tempat kedudukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan berada di Kecamatan dengan wilayah kerja meliputi kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari Pengawas atau Penilik Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari PNS lainnya.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan diangkat oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas.
- (5) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan bertugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan administrasi urusan kepegawaian dari Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
 - b. mengkoordinasikan pengelolaan data pendidikan dari Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
 - c. mengkoordinasikan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - d. mengkoordinasikan administrasi pengelolaan keuangan;
 - e. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan kegiatan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - f. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dibantu oleh Pejabat Pelaksana.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala, Wakil Kepala, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Satuan Pendidikan ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Kepala Tata Usaha pada SPF SMP Negeri yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditempatkannya Kepala Tata Usaha yang bersangkutan dalam jabatan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan diangkatnya Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (3) Kepala pada SPF TK Negeri, SPF SD Negeri, dan SPF SMP Negeri yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 982), khusus yang mengatur UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Magelang ini dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Februari 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
MAGELANG

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

- I. SD Negeri meliputi:
 - a. SD Negeri di Kecamatan Bandongan, terdiri dari:
 1. SD Negeri Bandongan 1;
 2. SD Negeri Bandongan 3;
 3. SD Negeri Bandongan 4;
 4. SD Negeri Banyuwangi 1;
 5. SD Negeri Banyuwangi 2;
 6. SD Negeri Banyuwangi 3;
 7. SD Negeri Gandusari 1;
 8. SD Negeri Gandusari 2;
 9. SD Negeri Kalegen 1;
 10. SD Negeri Kalegen 2;
 11. SD Negeri Kebonagung 1;
 12. SD Negeri Kebonagung 2;
 13. SD Negeri Kedungsari;
 14. SD Negeri Ngapanrejo;
 15. SD Negeri Rejosari 1;
 16. SD Negeri Rejosari 2;
 17. SD Negeri Salamkanci 1;
 18. SD Negeri Salamkanci 2;
 19. SD Negeri Sidorejo;
 20. SD Negeri Sukodadi 1;
 21. SD Negeri Sukodadi 2;
 22. SD Negeri Sukosari;
 23. SD Negeri Tonoboyo 1;
 24. SD Negeri Tonoboyo 2;
 25. SD Negeri Trasan 1;
 26. SD Negeri Trasan 2; dan
 27. SD Negeri Trasan 4.
 - b. SD Negeri di Kecamatan Borobudur, terdiri dari:
 1. SD Negeri Bigaran;
 2. SD Negeri Borobudur 1;
 3. SD Negeri Borobudur 2;
 4. SD Negeri Bumiharjo;
 5. SD Negeri Candirejo 1;
 6. SD Negeri Candirejo 4;
 7. SD Negeri Giripurno 1;
 8. SD Negeri Giripurno 2;
 9. SD Negeri Giritengah 1;
 10. SD Negeri Giritengah 2;
 11. SD Negeri Karanganyar;
 12. SD Negeri Karangrejo;
 13. SD Negeri Kebonsari;

14. SD Negeri Kembanglimus;
 15. SD Negeri Majaksingi;
 16. SD Negeri Ngadiharjo 1;
 17. SD Negeri Ngadiharjo 2;
 18. SD Negeri Ngargogondo;
 19. SD Negeri Ringinputih 1;
 20. SD Negeri Ringinputih 2;
 21. SD Negeri Ringinputih 3;
 22. SD Negeri Sambeng;
 23. SD Negeri Tanjungsari;
 24. SD Negeri Tegalarum;
 25. SD Negeri Tuksongo 1;
 26. SD Negeri Wanurejo; dan
 27. SD Negeri Satu Atap Kerugmunggang.
- c. SD Negeri di Kecamatan Candimulyo, terdiri dari:
1. SD Negeri Beningan;
 2. SD Negeri Candimulyo 1;
 3. SD Negeri Candimulyo 2;
 4. SD Negeri Geneng 1;
 5. SD Negeri Geneng 2;
 6. SD Negeri Giyanti;
 7. SD Negeri Kebonrejo;
 8. SD Negeri Kembaran;
 9. SD Negeri Mejing 1;
 10. SD Negeri Mejing 2;
 11. SD Negeri Pager;
 12. SD Negeri Podosoko;
 13. SD Negeri Purworejo;
 14. SD Negeri Sonorejo;
 15. SD Negeri Surodadi 1;
 16. SD Negeri Surodadi 3;
 17. SD Negeri Surojoyo;
 18. SD Negeri Tampir Kulon 1;
 19. SD Negeri Tampir Kulon 2;
 20. SD Negeri Tampir Wetan;
 21. SD Negeri Tegalsari 2;
 22. SD Negeri Tembelang;
 23. SD Negeri Tempak 1;
 24. SD Negeri Tempursari;
 25. SD Negeri Trenten 1; dan
 26. SD Negeri Trenten 2.
- d. SD Negeri di Kecamatan Dukun, terdiri dari:
1. SD Negeri Ngargomulyo;
 2. SD Negeri Banyubiru 1;
 3. SD Negeri Banyubiru 2;
 4. SD Negeri Banyudono 1;
 5. SD Negeri Banyudono 2;
 6. SD Negeri Banyudono 4;
 7. SD Negeri Dukun 1;
 8. SD Negeri Dukun 2;
 9. SD Negeri Dukun 3;
 10. SD Negeri Dukun 4;
 11. SD Negeri Kalibening;
 12. SD Negeri Keningar 1;
 13. SD Negeri Keningar 2;
 14. SD Negeri Ketunggeng 1;
 15. SD Negeri Krinjing 1;
 16. SD Negeri Krinjing 2;

17. SD Negeri Mangunsoka;
 18. SD Negeri Ngadipuro;
 19. SD Negeri Paten 1;
 20. SD Negeri Paten 2;
 21. SD Negeri Sengi 1;
 22. SD Negeri Sengi 2;
 23. SD Negeri Sewukan 1;
 24. SD Negeri Sumber; dan
 25. SD Negeri Wates.
- e. SD Negeri di Kecamatan Grabag, terdiri dari:
1. SD Negeri Baleagung;
 2. SD Negeri Banjarsari;
 3. SD Negeri Banyusari;
 4. SD Negeri Bono;
 5. SD Negeri Citrosono;
 6. SD Negeri Cokro;
 7. SD Negeri Giriwetan;
 8. SD Negeri Grabag 1;
 9. SD Negeri Grabag 3;
 10. SD Negeri Kalikuto;
 11. SD Negeri Kalipucang;
 12. SD Negeri Kartoharjo;
 13. SD Negeri Kayupuring;
 14. SD Negeri Ketawang 1;
 15. SD Negeri Ketawang 2;
 16. SD Negeri Klegen;
 17. SD Negeri Kleteran 1;
 18. SD Negeri Kleteran 3;
 19. SD Negeri Lebak;
 20. SD Negeri Losari;
 21. SD Negeri Ngasinan 1;
 22. SD Negeri Ngasinan 2;
 23. SD Negeri Ngrancah;
 24. SD Negeri Pagonan;
 25. SD Negeri Pesidi;
 26. SD Negeri Pucungsari;
 27. SD Negeri Salam;
 28. SD Negeri Sambungrejo;
 29. SD Negeri Sugihmas 1;
 30. SD Negeri Sugihmas 2;
 31. SD Negeri Sumurarum;
 32. SD Negeri Tirto;
 33. SD Negeri Tlogorejo; dan
 34. SD Negeri Banaran 1.
- f. SD Negeri di Kecamatan Kajoran, terdiri dari:
1. SD Negeri Bambusari;
 2. SD Negeri Bangsri;
 3. SD Negeri Banjaragung;
 4. SD Negeri Banjaretno;
 5. SD Negeri Bumiayu;
 6. SD Negeri Kajoran 1;
 7. SD Negeri Kajoran 2;
 8. SD Negeri Krinjing;
 9. SD Negeri Kuwaderan 1;
 10. SD Negeri Kuwaderan 2;
 11. SD Negeri Lesanpuro;
 12. SD Negeri Mangunrejo;
 13. SD Negeri Ngargosari;

14. SD Negeri Ngendrosari;
 15. SD Negeri Pandanretno;
 16. SD Negeri Pandansari;
 17. SD Negeri Pucungroto;
 18. SD Negeri Sambak;
 19. SD Negeri Sidorejo;
 20. SD Negeri Sidowangi;
 21. SD Negeri Sukomulyo;
 22. SD Negeri Sutopati 1;
 23. SD Negeri Sutopati 2;
 24. SD Negeri Sutopati 3;
 25. SD Negeri Sutopati 4;
 26. SD Negeri Sutopati 5;
 27. SD Negeri Wonogiri;
 28. SD Negeri Wuwuharjo 1; dan
 29. SD Negeri Wuwuharjo 2.
- g. SD Negeri di Kecamatan Kaliangkrik, terdiri dari:
1. SD Negeri Balekerto;
 2. SD Negeri Balerejo;
 3. SD Negeri Banjarejo;
 4. SD Negeri Beseran;
 5. SD Negeri Bumirejo;
 6. SD Negeri Butuh 1;
 7. SD Negeri Girirejo;
 8. SD Negeri Giriwarno;
 9. SD Negeri Kaliangkrik 1;
 10. SD Negeri Kebonlegi;
 11. SD Negeri Ketangi;
 12. SD Negeri Maduretno;
 13. SD Negeri Mangli;
 14. SD Negeri Munggangsari;
 15. SD Negeri Ngargosoko;
 16. SD Negeri Ngawonggo 1;
 17. SD Negeri Ngawonggo 2;
 18. SD Negeri Ngendrokilo;
 19. SD Negeri Pengarengan 1;
 20. SD Negeri Prampelan 2;
 21. SD-SMP Negeri Satu Atap Prampelan;
 22. SD Negeri Selomoyo; dan
 23. SD Negeri Temanggung 1.
- h. SD Negeri di Kecamatan Mertoyudan, terdiri dari:
1. SD Negeri Banjarnegoro 1;
 2. SD Negeri Banjarnegoro 2;
 3. SD Negeri Banjarnegoro 3;
 4. SD Negeri Banyakan;
 5. SD Negeri Banyurojo 1;
 6. SD Negeri Banyurojo 2;
 7. SD Negeri Banyurojo 3;
 8. SD Negeri Bulurejo 1;
 9. SD Negeri Danurejo 1;
 10. SD Negeri Deyangan 1;
 11. SD Negeri Deyangan 2;
 12. SD Negeri Donorojo;
 13. SD Negeri Jogonegoro 1;
 14. SD Negeri Kalinegoro 1;
 15. SD Negeri Kalinegoro 2;
 16. SD Negeri Kalinegoro 3;
 17. SD Negeri Kalinegoro 5;

18. SD Negeri Kalinegoro 6;
 19. SD Negeri Kalisari;
 20. SD Negeri Mertoyudan 1;
 21. SD Negeri Mertoyudan 3;
 22. SD Negeri Panca Arga 1;
 23. SD Negeri Pasuruhan 1;
 24. SD Negeri Pasuruhan 2;
 25. SD Negeri Pasuruhan 4;
 26. SD Negeri Permitan 1;
 27. SD Negeri Permitan 2;
 28. SD Negeri Pirikan;
 29. SD Negeri Saratan;
 30. SD Negeri Soka;
 31. SD Negeri Soroyudan;
 32. SD Negeri Sukorejo 1;
 33. SD Negeri Sukorejo 2;
 34. SD Negeri Sukorejo 3;
 35. SD Negeri Sumberrejo; dan
 36. SD Negeri Tanjunganom.
- i. SD Negeri di Kecamatan Mungkid, terdiri dari:
1. SD Negeri Ambartawang;
 2. SD Negeri Blondo 1;
 3. SD Negeri Blondo 3;
 4. SD Negeri Bumirejo 1;
 5. SD Negeri Bumirejo 2;
 6. SD Negeri Gondang;
 7. SD Negeri Mendut;
 8. SD Negeri Mungkid 1;
 9. SD Negeri Mungkid 2;
 10. SD Negeri Pabelan 2;
 11. SD Negeri Pabelan 3;
 12. SD Negeri Pagersari;
 13. SD Negeri Paremono 1;
 14. SD Negeri Paremono 3;
 15. SD Negeri Paremono 4;
 16. SD Negeri Progowati 1;
 17. SD Negeri Rambeanak 1;
 18. SD Negeri Rambeanak 2;
 19. SD Negeri Sawitan;
 20. SD Negeri Senden 2;
 21. SD Negeri Treko 1;
 22. SD Negeri Treko 2;
 23. SD Negeri Ngrajek 1; dan
 24. SD Negeri Bojong 1.
- j. SD Negeri di Kecamatan Muntilan, terdiri dari:
1. SD Negeri Adikarto 1;
 2. SD Negeri Adikarto 2;
 3. SD Negeri Congkrang 1;
 4. SD Negeri Congkrang 2;
 5. SD Negeri Gondosuli 1;
 6. SD Negeri Gondosuli 2;
 7. SD Negeri Gunungpring 1;
 8. SD Negeri Gunungpring 2;
 9. SD Negeri Gunungpring 3;
 10. SD Negeri Gunungpring 4;
 11. SD Negeri Keji 1;
 12. SD Negeri Keji 2;
 13. SD Negeri Menayu 1;

14. SD Negeri Menayu 2;
 15. SD Negeri Muntilan;
 16. SD Negeri Muntilan 3;
 17. SD Negeri Ngawen 1;
 18. SD Negeri Pucungrejo 1;
 19. SD Negeri Pucungrejo 2;
 20. SD Negeri Sedayu 1;
 21. SD Negeri Sedayu 2;
 22. SD Negeri Sedayu 4;
 23. SD Negeri Sokorini 1;
 24. SD Negeri Sokorini 2;
 25. SD Negeri Sriwedari 1;
 26. SD Negeri Tamanagung 1;
 27. SD Negeri Tamanagung 2;
 28. SD Negeri Tamanagung 3;
 29. SD Negeri Tamanagung 4; dan
 30. SD Negeri Tanjung.
- k. SD Negeri di Kecamatan Ngablak, terdiri dari:
1. SD Negeri Bandungrejo;
 2. SD Negeri Genikan;
 3. SD Negeri Girirejo 2;
 4. SD Negeri Girirejo 3;
 5. SD Negeri Jagonayan;
 6. SD Negeri Jogoyasan;
 7. SD Negeri Kanigoro 1;
 8. SD Negeri Kanigoro 2;
 9. SD Negeri Keditan;
 10. SD Negeri Madyogondo 2;
 11. SD Negeri Madyogondo 3;
 12. SD Negeri Magersari;
 13. SD Negeri Ngablak 1;
 14. SD Negeri Ngablak 2;
 15. SD Negeri Ngablak 5;
 16. SD Negeri Pagergunung;
 17. SD Negeri Pandean 1;
 18. SD Negeri Pandean 2;
 19. SD Negeri Selomirah;
 20. SD Negeri Seloprojo;
 21. SD Negeri Sumberejo 1;
 22. SD Negeri Sumberejo 2; dan
 23. SD Negeri Tejosari.
- l. SD Negeri di Kecamatan Ngluwar, terdiri dari:
1. SD Negeri Bligo 1;
 2. SD Negeri Bligo 2;
 3. SD Negeri Bligo 3;
 4. SD Negeri Blongkeng 1;
 5. SD Negeri Blongkeng 3;
 6. SD Negeri Druju 2;
 7. SD Negeri Jamus 1;
 8. SD Negeri Jamus 2;
 9. SD Negeri Karangtalun 1;
 10. SD Negeri Karangtalun 2;
 11. SD Negeri Ngluwar 1;
 12. SD Negeri Ngluwar 2;
 13. SD Negeri Ngluwar 3;
 14. SD Negeri Pakunden 1;
 15. SD Negeri Pakunden 2;
 16. SD Negeri Pakunden 3;

17. SD Negeri Plosogede 1;
 18. SD Negeri Somokaton 1; dan
 19. SD Negeri Somokaton 2.
- m. SD Negeri di Kecamatan Pakis, terdiri dari:
1. SD Negeri Banyusidi;
 2. SD Negeri Bawang 1;
 3. SD Negeri Daleman Kidul 1;
 4. SD Negeri Daleman Kidul 2;
 5. SD Negeri Daseh;
 6. SD Negeri Gejagan;
 7. SD Negeri Gondangsari 1;
 8. SD Negeri Gejayan;
 9. SD Negeri Gumelem 1;
 10. SD Negeri Jambewangi;
 11. SD Negeri Kajangkoso;
 12. SD Negeri Kaponan;
 13. SD Negeri Kenalan;
 14. SD Negeri Ketundan 1;
 15. SD Negeri Ketundan 2;
 16. SD Negeri Kragilan;
 17. SD Negeri Krasak;
 18. SD Negeri Losari;
 19. SD Negeri Muneng 1;
 20. SD Negeri Pakis 1;
 21. SD Negeri Petung 1;
 22. SD Negeri Petung 2;
 23. SD Negeri Pogalan 1;
 24. SD Negeri Pogalan 3;
 25. SD Negeri Rejosari;
 26. SD Negeri Sekayu;
 27. SD Negeri Sobowono;
 28. SD Negeri Warangan 1;
 29. SD Negeri Warangan 2; dan
 30. SD Negeri Wiropati.
- n. SD Negeri di Kecamatan Salam, terdiri dari:
1. SD negeri Baturono;
 2. SD Negeri Gulon 1;
 3. SD Negeri Gulon 2;
 4. SD Negeri Gulon 4;
 5. SD Negeri Gulon 5;
 6. SD Negeri Jumoyo 2;
 7. SD Negeri Jumoyo 4;
 8. SD Negeri Kadiluwih;
 9. SD Negeri Kangkungan;
 10. SD Negeri Mantingan;
 11. SD Negeri Salam 1;
 12. SD Negeri Seloboro;
 13. SD Negeri Sirahan 1;
 14. SD Negeri Sirahan 2;
 15. SD Negeri Somokerto;
 16. SD Negeri Sucen;
 17. SD Negeri Tersan Gede 1;
 18. SD Negeri Tersan Gede 2; dan
 19. SD Negeri Tirto.
- o. SD Negeri di Kecamatan Salaman, terdiri dari:
1. SD Negeri Banjarharjo;
 2. SD Negeri Beteng;
 3. SD Negeri Jebengsari;

4. SD Negeri Kaliabu;
 5. SD Negeri Kalirejo 1;
 6. SD Negeri Kalirejo 3;
 7. SD Negeri Kalisalak;
 8. SD Negeri Kebonrejo 1;
 9. SD Negeri Kebonrejo 2;
 10. SD Negeri Krasak 1;
 11. SD Negeri Krasak 2;
 12. SD Negeri Margoyoso 1;
 13. SD Negeri Menoreh;
 14. SD Negeri Ngadirejo;
 15. SD Negeri Ngargoretno 1;
 16. SD Negeri Ngargoretno 2;
 17. SD Negeri Pancar;
 18. SD Negeri Paripurno;
 19. SD Negeri Purwosari;
 20. SD Negeri Salaman 1;
 21. SD Negeri Salaman 2;
 22. SD Negeri Salaman 3;
 23. SD Negeri Salaman 4;
 24. SD Negeri Sawangargo;
 25. SD Negeri Sidomulyo 1;
 26. SD Negeri Sidomulyo 2;
 27. SD Negeri Sidosari;
 28. SD Negeri Sriwedari 1;
 29. SD Negeri Sriwedari 2; dan
 30. SD Negeri Tanjunganom.
- p. SD Negeri di Kecamatan Sawangan, terdiri dari:
1. SD Negeri Banyuroto 1;
 2. SD Negeri Butuh 1;
 3. SD Negeri Butuh 2;
 4. SD Negeri Gantang 1;
 5. SD Negeri Gantang 2;
 6. SD Negeri Gondowangi 1;
 7. SD Negeri Jati 1;
 8. SD Negeri Jati 2;
 9. SD Negeri Jati 3;
 10. SD Negeri Kapuhan 1;
 11. SD Negeri Kapuhan 2;
 12. SD Negeri Ketep 1;
 13. SD Negeri Krogowanan;
 14. SD Negeri Mangunsari 1;
 15. SD Negeri Mangunsari 3;
 16. SD Negeri Podosoko 1;
 17. SD Negeri Podosoko 2;
 18. SD Negeri Podosoko 4;
 19. SD Negeri Sawangan 1;
 20. SD Negeri Sawangan 3;
 21. SD Negeri Sawangan 4;
 22. SD Negeri Soronalan 1;
 23. SD Negeri Soronalan 2;
 24. SD Negeri Tirtosari 1;
 25. SD Negeri Wonolelo 1;
 26. SD Negeri Wonolelo 3;
 27. SD Negeri Wonolelo 4; dan
 28. SD Negeri Wulunggunung 1.

- q. SD Negeri di Kecamatan Secang, terdiri dari:
1. SD Negeri Candisari;
 2. SD Negeri Donomulyo;
 3. SD Negeri Girikulon;
 4. SD Negeri Jambewangi;
 5. SD Negeri Kalijoso;
 6. SD Negeri Karangkajen;
 7. SD Negeri Krincing;
 8. SD Negeri Kuwaluhan;
 9. SD Negeri Madusari;
 10. SD Negeri Madyocondro;
 11. SD Negeri Ngabean;
 12. SD Negeri Ngadirojo;
 13. SD Negeri Pancuranmas;
 14. SD Negeri Payaman 1;
 15. SD Negeri Payaman 2;
 16. SD Negeri Pucang;
 17. SD Negeri Secang 1;
 18. SD Negeri Secang 2;
 19. SD Negeri Secang 3;
 20. SD Negeri Setan;
 21. SD Negeri Sidomulyo;
 22. SD Negeri Pirikan; dan
 23. SD Negeri Purwosari.
- r. SD Negeri di Kecamatan Srumbung, terdiri dari:
1. SD Negeri Banyuadem;
 2. SD Negeri Bringin 1;
 3. SD Negeri Jamblangan;
 4. SD Negeri Jerukagung 1;
 5. SD Negeri Jerukagung 2;
 6. SD Negeri Kaliurang 1;
 7. SD Negeri Kaliurang 2;
 8. SD Negeri Kamongan;
 9. SD Negeri Kemiren;
 10. SD Negeri Kradenan 1;
 11. SD Negeri Kradenan 2;
 12. SD Negeri Kradenan 3;
 13. SD Negeri Mranggen 1;
 14. SD Negeri Mranggen 2;
 15. SD Negeri Ngablak;
 16. SD Negeri Pandanretno;
 17. SD Negeri Polengan 1;
 18. SD Negeri Pucanganom;
 19. SD Negeri Sikepan 1;
 20. SD Negeri Sikepan 2;
 21. SD Negeri Soka 1;
 22. SD Negeri Soka 2;
 23. SD Negeri Srumbung 1;
 24. SD Negeri Srumbung 2;
 25. SD Negeri Sudimoro 1;
 26. SD Negeri Sudimoro 2; dan
 27. SD Negeri Tegalrandu.
- s. SD Negeri di Kecamatan Tegalrejo, terdiri dari:
1. SD Negeri Banyuurip 1;
 2. SD Negeri Banyuurip 2;
 3. SD Negeri Dawung;
 4. SD Negeri Donorojo;
 5. SD Negeri Geger;

6. SD Negeri Glagahombo;
 7. SD Negeri Japan;
 8. SD Negeri Kebonagung;
 9. SD Negeri Klopo 1;
 10. SD Negeri Ngadirejo;
 11. SD Negeri Ngasem;
 12. SD Negeri Purwodadi;
 13. SD Negeri Purwosasi Tegalrejo;
 14. SD Negeri Sidorejo;
 15. SD Negeri Soroyudan;
 16. SD Negeri Sukorejo;
 17. SD Negeri Tampingan 1;
 18. SD Negeri Tampingan 2;
 19. SD Negeri Tegalrejo;
 20. SD Negeri Wonokerto;
 21. SD Negeri Wonosuko;
 22. SD Negeri Banyusari;
 23. SD Negeri Dlimas;
 24. SD Negeri Girirejo;
 25. SD Negeri Klopo 2; dan
 26. SD Negeri Mangunrejo.
- t. SD Negeri di Kecamatan Tempuran, terdiri dari:
1. SD Negeri Bawang;
 2. SD Negeri Girirejo 1;
 3. SD Negeri Growong;
 4. SD Negeri Jambu;
 5. SD Negeri Jogomulyo;
 6. SD Negeri Kalisari 1;
 7. SD Negeri Kalisari 2;
 8. SD Negeri Kemutuk;
 9. SD Negeri Prajeksari 1;
 10. SD Negeri Prajeksari 2;
 11. SD Negeri Ringinanom 1;
 12. SD Negeri Ringinanom 2;
 13. SD Negeri Sidoagung 1;
 14. SD Negeri Sidoagung 2;
 15. SD Negeri Sidoagung 3;
 16. SD Negeri Sumberarum 1;
 17. SD Negeri Sumberarum 2;
 18. SD Negeri Tanggulrejo 1;
 19. SD Negeri Temanggal;
 20. SD Negeri Tempurejo 1;
 21. SD Negeri Tempurejo 2;
 22. SD Negeri Tugurejo; dan
 23. SD Negeri Girirejo 2;.
- u. SD Negeri di Kecamatan Windusari, terdiri dari:
1. SD Negeri Bandarsedayu;
 2. SD Negeri Banjarsari 2;
 3. SD Negeri Candisari;
 4. SD Negeri Dampit;
 5. SD Negeri Genito;
 6. SD Negeri Girimulyo;
 7. SD Negeri Gondangrejo;
 8. SD Negeri Gunungsari;
 9. SD Negeri Kembangkuning 1;
 10. SD Negeri Kembangkuning 2;
 11. SD Negeri Mangunsari;
 12. SD Negeri Ngemplak;

13. SD Negeri Pasangsari;
14. SD Negeri Semen;
15. SD Negeri Tanjungsari 1;
16. SD Negeri Tanjungsari 2;
17. SD Negeri Tinjumoyo;
18. SD Negeri Windusari 1;
19. SD Negeri Windusari 2;
20. SD Negeri Wonoroto; dan
21. SD Negeri Kalijoso.

II. SMP Negeri meliputi:

1. SMP Negeri 1 Bandongan;
2. SMP Negeri 2 Bandongan;
3. SMP Negeri 1 Borobudur;
4. SMP Negeri 2 Borobudur;
5. SMP Negeri 3 Satu Atap Borobudur;
6. SMP Negeri 1 Candimulyo;
7. SMP Negeri 2 Candimulyo;
8. SMP Negeri 3 Candimulyo;
9. SMP Negeri 1 Dukun;
10. SMP Negeri 2 Dukun;
11. SMP Negeri 1 Grabag;
12. SMP Negeri 2 Grabag;
13. SMP Negeri 3 Grabag;
14. SMP Negeri 1 Kajoran;
15. SMP Negeri 2 Kajoran;
16. SMP Negeri 1 Kaliangkrik;
17. SMP Negeri 2 Kaliangkrik;
18. SMP Negeri 3 Satu Atap Kaliangkrik;
19. SMP Negeri 1 Kota Mungkid;
20. SMP Negeri 1 Mertoyudan;
21. SMP Negeri 2 Mertoyudan;
22. SMP Negeri 3 Mertoyudan;
23. SMP Negeri 1 Mungkid;
24. SMP Negeri 2 Mungkid;
25. SMP Negeri 1 Muntilan;
26. SMP Negeri 2 Muntilan;
27. SMP Negeri 3 Muntilan;
28. SMP Negeri 1 Ngablak;
29. SMP Negeri 2 Ngablak;
30. SMP Negeri 3 Satu Atap Ngablak;
31. SMP Negeri 1 Ngluwar;
32. SMP Negeri 1 Pakis;
33. SMP Negeri 2 Pakis;
34. SMP Negeri 3 Pakis;
35. SMP Negeri 4 Satu Atap Pakis;
36. SMP Negeri 5 Pakis Pogalan;
37. SMP Negeri 1 Salam;
38. SMP Negeri 2 Salam;
39. SMP Negeri 3 Salam;
40. SMP Negeri 1 Salaman;
41. SMP Negeri 2 Salaman;
42. SMP Negeri 3 Salaman;
43. SMP Negeri 4 Satu Atap Salaman;
44. SMP Negeri 1 Sawangan;
45. SMP Negeri 2 Sawangan;
46. SMP Negeri 3 Sawangan;
47. SMP Negeri 4 Satu Atap Sawangan;

48. SMP Negeri 1 Secang;
49. SMP Negeri 2 Secang;
50. SMP Negeri 3 Secang;
51. SMP Negeri 1 Srumbung;
52. SMP Negeri 2 Srumbung;
53. SMP Negeri 1 Tegalrejo;
54. SMP Negeri 2 Tegalrejo;
55. SMP Negeri 1 Tempuran;
56. SMP Negeri 2 Tempuran;
57. SMP Negeri 3 Tempuran;
58. SMP Negeri 1 Windusari; dan
59. SMP Negeri 2 Windusari.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

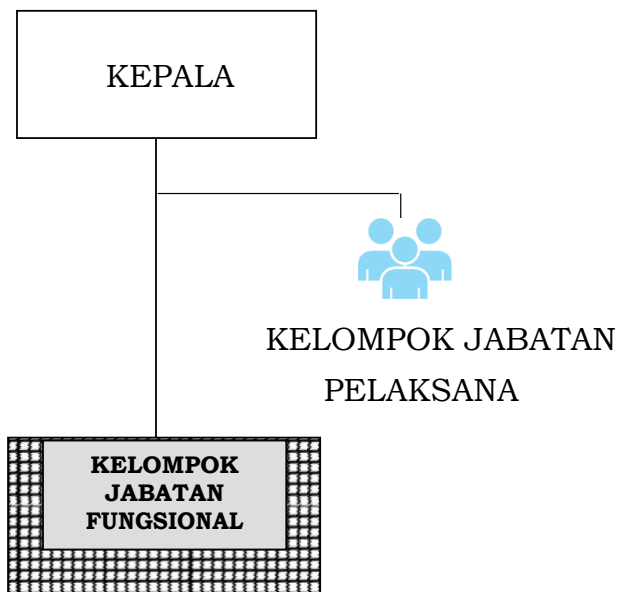
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN
MAGELANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG

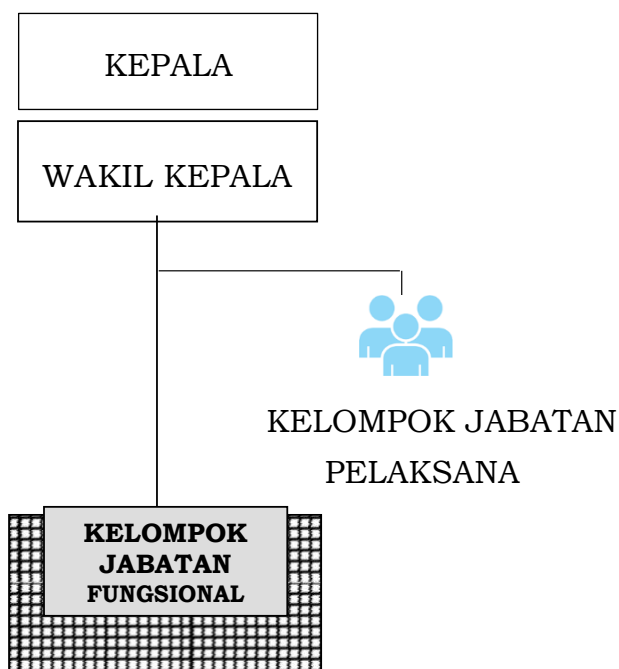
I. TK NEGERI



II. SD NEGERI



III. SMP NEGERI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN